



STRATEGI YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN INOVASI DESA WISATA

Jeni Minan¹ Jahrudin², Ahmad Hanif Aulia³, dan Muhamad Septian⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

minanjemi@gmail.com

Abstrak

Desa Ponggok merupakan desa wisata yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang memiliki potensi alam berupa sumber mata air jernih, segar dan melimpah dengan Umbul Ponggok sebagai objek wisata andalan. Selain itu, Desa Ponggok juga menawarkan wisata edukasi terkait tata kelola Desa dan BUMDes, pengelolaan wisata, budidaya perikanan, budidaya maggot, ketahanan pangan, pertanian, pengelolaan sampah, dan UMKM. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan Pengembangan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Penelitian kualitatif ini peneliti melakukan pengolahan dan teknik analisa data melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta membuat kesimpulan serta dengan pendekatan metode analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, treath*), seluruh data ditelaah bersama-sama untuk mendapatkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Strategi Dalam Mewujudkan Desa Wisata dan Strategi dalam Pengembangan Desa Wisata oleh pemerintahan desa melibatkan perencanaan yang terarah dan partisipasi masyarakat. Selain itu, strategi seperti pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam juga menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah; Pengembangan Inovasi; Desa Wisata

Abstract

Ponggok Village is a tourist village in Polanharjo District, Klaten Regency which has natural potential in the form of clear, fresh and abundant spring water with Umbul Ponggok as a mainstay tourist attraction. Apart from that, Ponggok Village also offers educational tours related to Village and BUMDes governance, tourism management, fisheries cultivation, maggot cultivation, food security, agriculture, waste management and MSMEs. This method is used to describe the development of village potential towards a tourist village in Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency. In this qualitative research, researchers carry out data processing and analysis techniques through the process of systematically searching and compiling data from interviews, observations and documentation as well as making conclusions and using the SWOT (strength, weakness, opportunity, treath) analysis method approach, all data is reviewed together to get strengths, weaknesses, opportunities and threats. The strategies implemented by the village government are the Strategy for Creating a Tourism Village and the Strategy for Developing a Tourism Village by the village government involving targeted planning and community participation. Apart from that, strategies such as community empowerment and utilization of natural resources are also key to implementing effective development.

Keywords: Government Strategy; Innovation Development; Tourism Village



PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dari kewarganegaraan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

R. Bintarto (2010), menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dan diberikan wewenang untuk mengelola berbagai aspek, seperti pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga memiliki perangkat desa yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ditingkat desa.

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki berbagai macam atraksi wisata. Juga dapat dilihat sebagai suatu pemukiman dengan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati, mengenal dan menghayati kekhasan desa dengan

segala daya tariknya dan tuntutan kegiatan hidup bermasyarakat (Hadiwijoyo, 2012). Desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan dan pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis, pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat disebut dengan desa wisata.

Desa Ponggok adalah Desa wisata yang berada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang memiliki potensi alam berupa sumber mata air jernih, segar dan melimpah dengan Umbul Ponggok sebagai objek wisata andalan. Desa Ponggok memiliki beberapa objek wisata, antara lain Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Sigedhang, dan Waduk Galau. Selain itu, Desa Ponggok juga menawarkan wisata edukasi terkait tata kelola Desa dan BUMDes, pengelolaan wisata, budidaya perikanan, budidaya maggot, ketahanan pangan, pertanian, pengelolaan sampah, dan UMKM. Menurut BumDes (Badan Usaha Milik Desa) Tirta Mandiri dalam Kiswanto & Susanto (2019), berkembangnya Desa Wisata Ponggok tidak terlepas dari peran pengelola dan pemerintah Desa. Pengelola dan pemerintah Desa berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung atraksi wisata yang berupa kolam renang untuk orang dewasa dan



anak-anak, penyewaan alat snorkeling dan alat diving, penambahan jenis-jenis ikan air tawar, wahana permainan, penambahan kolam air dari berbagai jenis keindahan dan pemeliharaan sumber air yang masih alami, serta pembangunan prasarana pendukung fisik bangunan berupa restoran/warung makan, tempat parkir lahan warga, gazebo, toilet, musala, toko kelontong, pasar wisata, dan toko wisata. (Kabes Rumidan, 2022)

Pengembangan Desa wisata adalah salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang dapat di kembangkan potensi-potensi yang ada di suatu Desa, di dalam pengembangan Desa wisata harus mengetahui secara detail terkait karakteristik, kelebihan dan kelemahan Desa tersebut, sehingga Desa wisata dapat sesuai dengan daya tarik yang akan dijual.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian yang telah berlangsung. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan Pengembangan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Di Desa Ponggok Kecamatan polanharjo Kabupaten Klaten. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan fokus yang diteliti, meliputi; Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata, Potensi dan permasalahan Desa, inovasi Desa Wisata, Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Desa Wisata, Pengelolaan Desa Wisata. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, studi

Pustaka atau studi dokumen atau pengkajian. Penelitian kualitatif ini peneliti melakukan pengolahan dan teknik analisa data melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta membuat kesimpulan serta dengan pendekatan metode analisa SWOT (strength, weaknesess, opportunity, treath), seluruh data ditelaah bersama-sama untuk mendapatkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Dalam Mewujudkan Desa Wisata

Dalam Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata pada 2012 dijelaskan detail mengenai mekanisme Pokdarwis tersebut. Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh stakeholder yang ada dan terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Karena masing-masing stakeholder tidak dapat berdiri sendiri, maka harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati. Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan.

Sementara kalangan swasta (baik itu pelaku usaha/industri pariwisata) melalui sumber daya, modal dan jejaring yang dimiliki sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan. Adapun masyarakat



dengan sumber daya yang dimiliki berupa adat, tradisi, dan budaya berperan sebagai tuan rumah sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan dan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan harus diciptakan mulai dari lingkungan dan suasana yang kondusif. Iklim atau lingkungan kondusif tersebut juga tidak lepas dari perwujudan konsep Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Model pergerakan Pokdarwis ini bahkan sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.

Konsep dari sadar wisata dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif. Dimana masyarakat menyadari peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif. Di samping itu, masyarakat menyadari hak dan kebutuhan untuk menjadi pelaku wisata sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air. Kedua elemen tersebut juga harus mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam sapta pesona, yaitu harus mewujudkan lingkungan yang kondusif dan ideal bagi perkembangan kegiatan kepariwisataan. Hal ini akan mendorong minat wisatawan. Sapta pesona tersebut meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Bagi masyarakat sendiri sadar wisata ini memiliki prospek

yang baik, yaitu lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan yang meningkat.

Artinya, keberadaan Pokdarwis dalam konteks pengembangan desa wisata berperan sebagai salah satu unsur penggerak. Secara kolektif tindakan ini akan berdampak positif bagi perkembangan desa wisata yang lebih luas. Oleh karena itu, peran dan kontribusi dari Pokdarwis perlu terus didukung dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna menopang perkembangan dan pertumbuhan yang ada khususnya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. Secara umum, fungsi dari Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan dapat sebagai penggerak konsep sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan mereka. Juga sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah (Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata, 2012).

Pada akhirnya, penyusunan dan pembentukan Pokdarwis tersebut menjadi acuan guna meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan kepariwisataan di daerah akan terus berjalan. Pengembangan kepariwisataan yang ada di daerah juga secara pesat dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Kesejahteraan masyarakat di desa-desa tidak lagi diremehkan karena sudah mampu memaksimalkan potensi sekaligus mengedepankan konsep konservasi alam yang terkadang saat ini dianggap remeh. Padahal, sejatinya memperkenalkan segala potensi tersebut mampu menyedot daya tarik wisatawan yang ada di desa-desa



Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa ponggok dalam mewujudkan desa wisata:

- a. Pengembangan obyek wisata
Desa ponggok telah mengembangkan berbagai obyek wisata seperti umbul ponggok, ponggok cilebong, dan umbul kapilater, yang menawarkan kegiatan wisata air seperti berenang, snorkling, diving, dan foto dibawah air.
- b. Peningkatan kualitas wisata
Fokus pada peningkatan kualitas wisata pengembangan paket wisata terintegrasi yang sesuai CHSE (Clean, Healty, Safety, dan Environment)
- c. Kerjasama dengan insitusi pendidikan
Junaedi Mulyono kepala desa menjalin kerja sama dengan Universitas Gajah Mada untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan dalam pengembangan potensi wisata
- d. Pengembangan fasilitas wisata
Pengembangan lokasi parkir sentral dan transportasi seperti kereta atau mini bus untuk mengantarkan wisatawan ke berbagai lokasi wisata di desa
- e. Pengembangan kualitas kuliner dan penginapan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran lingkungan.

2. Strategi dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan destinasi wisata merupakan salah satu cara untuk menjadikan lingkungan lebih maju, baik, dan berguna bagi semua kalangan.

Suwantoro (2009: 74) berpendapat beberapa bentuk produk pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pariwisata budaya (cultural tourism), ekowisata (ecotourism), pariwisata bahari (marine tourism), pariwisata petualangan (adventure tourism), pariwisata agro (agro tourism), pariwisata pedesaan (village tourism), gastronomy (culinary tourism), dan pariwisata spiritual (spiritual tourism). Sementara dalam Permendagri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah pada Pasal 2 menjelaskan jenis ekowisata di daerah adalah ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan/atau ekowisata karst. Adapun pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata (Permendagri No. 33 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 6).

Pola seperti ini dapat juga dikembangkan oleh beberapa desa di Indonesia yang memiliki daya tarik untuk memaksimalkan peran pemberdayaan masyarakat. Widjaja (2011) menjelaskan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Ini berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Maka, masyarakat di desa sudah seharusnya dilibatkan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Karena ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan desa, terlebih yang akan menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Aturan hukum yang berlaku di desa ketika mengembangkan kepariwisataan adalah tanpa mengesampingkan tradisi dan adat masyarakat lokal. Sebab, melalui kebudayaan yang dilestarikan, masyarakat



mampu membangkitkan rasa cinta lingkungan sehingga tetap terjaga keaslian. Belum tentu di desa lain menemukan keunikan sebagaimana dimiliki desa tersebut. Artinya, hukum dapat diambil secara tegas dalam rangka melahirkan sebuah kebijakan yang melindungi kebudayaan bangsa. Inilah dasar dari ekowisata, termasuk juga untuk melestarikan kekayaan alam.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Konsep wisata tersebut bisa pula diaplikasikan untuk desa dan menjadi desa wisata. Dapat disimpulkan jika pengembangan desa wisata dalam bentuk produk adalah pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agro tourism*), gastronomy (*culinary tourism*), dan pariwisata spiritual (*spiritual tourism*). Daya tarik objek wisata di pedesaan sengaja dibuat dan dikembangkan oleh stakeholder supaya para wisatawan berbondong-bondong datang.

Seperti halnya destinasi wisata, konsep ekowisata juga memiliki beragam model. Antara lain pedesaan, agro, pegunungan, pantai, kuliner, dan lain-lain. Wisata pedesaan ini juga populer dengan istilah desa wisata, namun kekayaan potensi yang dimiliki hasil integrasi alam dengan tradisi yang menyatu. Sehingga melalui konsep desa wisata ini wisatawan

akan tinggal dan membaur di dalam atau dekat dengan suasana tradisional. Sementara wisata agro memperkuat jati diri desa yaitu dengan mengangkat hasil-hasil pertanian untuk dinikmati oleh wisatawan. Begitu pula dengan pegunungan dan pantai karena sudah menjual keindahan alam. Terkait kuliner, diakui Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dengan segala manfaat dapat dimaksimalkan untuk masyarakat lokal.

Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa ponggok dalam pengembangan desa wisata:

- a. **Pengelolaan desa wisata**
Desa ponggok telah membentuk lembaga pengelolaan desa wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
- b. **Pelestarian budaya lokal**
Desa ponggok mempromosikan kegiatan dan acara budaya lokal seperti tari tradisional, pameran kerajinan tangan, dan festival lokal untuk memperkenalkan warisan budaya desa kepada wisatawan
- c. **Pemberdayaan masyarakat**
Melalui progra, pelatihan masyarakat desa dioptimalkan sebagai pelaku usaha pariwisata. Hal ini menciptakan kerja lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pengembangan desa wisata
- d. **Pengelolaan lingkungan**
Desa ponggok menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam pembangunan desa wisata, seperti pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan penggunaan energi terbarukan



- e. Kerja sama dan promosi Desa ponggok menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal untuk mempromosikan destinasi wisata desa secara lebih luas.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, diambil kesimpulan bahwa:

1. dapat dikembangkan desa wisata di Indonesia melalui beberapa kekayaan yang dimiliki. Antara lain wisata petualangan, wisata agro, wisata bahari, wisata kuliner, wisata budaya dan sejarah, dan wisata kreatif. Dilanjutkan dengan pembinaan masyarakat yang diharapkan ekonomi desa juga ikut maju. Namun, memutuskan konsep desa wisata dapat dimulai dari tingkat RT hingga kepala desa dengan tetap menerima masukan dan pandangan camat serta walikota/bupati setempat.
2. Strategi pengembangan inovasi desa wisata oleh pemerintahan desa melibatkan perencanaan yang terarah dan partisipasi masyarakat. Selain itu, strategi seperti pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam juga menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif.

Pemerintahan Desa Ponggok di Jawa Tengah menerapkan strategi inovatif dalam pengembangan desa wisata dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, promosi potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah ini termasuk menciptakan fasilitas pariwisata

yang menarik, mengadakan, festival budaya, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Hasilnya desa ini berhasil menarik wisatawan dan mengubah stigma negatif menjadi destinasi wisata yang unggul, meningkatkan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu juga Desa Ponggok memiliki Model lain yaitu Model Pengembangan SDM Organisasi Pembelajaran (*Learning Organization*) Model ini, kaitanya dengan pengembangan SDM Desa Ponggok senantiasa memberikan kesempatan dan mendorong setiap individu yang ada untuk terus belajar dan memperluas kapasitas dirinya melalui kegiatan dan juga program yang dimiliki oleh Desa. Dengan melakukan pengembangan SDM melalui model organisasi pembelajaran Desa Ponggok siap menghadapi perubahan dengan mengelola perubahan itu sendiri (*managing change*) dan dapat mewujudkan upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Ponggok.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel Cendekiawan Menurut Sugiono, *Buku Metode Penelitian Kepustakaan/Mestika* Zed Yayasan Obor Indonesia 2008.
- Akhmad Mulyadi dan Teguh Imam Rahayu: 2022 *Pengembangan Potensi Desa Menuju Desa Wisata Di Desa Bermi Pulic Service And Governance* Jurnal Vol. 03 No. 01 Tahun 2022 Halaman 47-48
- Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata. Kementerian Pariwisata. (2012). http://www.kemenpar.go.id/userfiles/1_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf
- Craig, J.C., dan Grant, R.M. (2003). *Manajemen Strategik*. Jakarta:



- Mediator. Suwanto, Gamal. (2009). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Widjaja, HAW. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kabes Rumidan (2002)''*Kajian potensi dan permasalahan Desa ponggok kabupaten Klaten sebagai Desa wisata*''jurnal.uns.ac.id/jdk ,vol 4 no 22.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. The International Ecotourism Society (TIES), Ecotourism Statistical Fact Sheet, Quebec, Canada, 2002. Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataaan.
- R. Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung: Alumni, 2010